

# Warta Satu Data Indonesia

## Perkembangan Terkini Seputar Satu Data Indonesia

### Peran Strategis Indonesia untuk KTT ASEAN 2023

Setelah sukses menyelenggarakan Presidensi G20, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023. Keketuaan tersebut diserahkan dari Kamboja ke Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Phnom Penh bulan November 2022.

Dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Indonesia menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespons tantangan kawasan dan global. Selain itu, Keketuaan Indonesia dalam ASEAN Tahun 2023 akan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan demi kemakmuran rakyat ASEAN.

***Bersambung ke halaman 2 >***



### Peran Penting Kebijakan Satu Data dalam Penyusunan RPJMN 2025-2029

Sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai pen-

jabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Bappenas menggelar Kick off Meeting Penyusunan Rancangan RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan pada hari Rabu (30/08/2023) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat.

***Bersambung ke halaman 4 >***

### Ekonomi Indonesia Triwulan II-2023 Tumbuh 5,17 Persen



Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun.

***Bersambung ke halaman 6 >***

## Peran Strategis Indonesia untuk KTT ASEAN 2023

Sumber: ASEAN-Indonesia 2023

*(Sambungan dari halaman 1)*

### Momentum Peran Indonesia KTT ASEAN 2023

Hingga tahun 2021, ASEAN beranggotakan 10 anggota yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada akhir KTT ASEAN 2022, Timor Leste disepakati secara prinsip menjadi anggota ASEAN kesebelas.

Keketuaan negara Indonesia bukanlah yang pertama kali. Karena Indonesia telah berperan sebagai Keketuaan ASEAN secara resmi selama tiga kali (tahun 1976, 2003, 2011) dan menghasilkan capaian-capaian yang mendorong kemajuan ASEAN.

Periode keketuaan Indonesia di ASEAN akan berlangsung selama satu tahun, dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023 yang menandakan kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kawasan regional ASEAN di tengah kondisi *recovery* dunia pasca pandemi.

Keketuaan Indonesia ini sekaligus memberikan peluang dan menunjukkan peran strategis Indonesia memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN utamanya dalam membentuk tatanan kawasan yang mendasarkan pada multilateralisme dan nilai-nilai inklusivitas.

Namun ini bukanlah hal yang mudah bagi Indonesia, karena tentu saja menjadi Ketua KTT ASEAN 2023 juga memiliki tantangan dan permasalahan internasional yang cukup kompleks, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi. Pertama, tantangan datang dari persaingan negara besar, seperti antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan Amerika Serikat dan Rusia.

Kedua, tantangan juga datang dari keadaan ekonomi yang masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang kemudian menimbulkan berbagai krisis-ekonomi, pangan, energi, hingga perang. Berbagai tantangan tersebut memiliki potensi untuk mengancam stabilitas kawasan, melemahkan sentralitas, dan meng-

ancam relevansi ASEAN sebagai aktor yang berperan dalam membentuk tatanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

Untuk itulah, keketuaan Indonesia pada tahun 2023 yang mengangkat tema *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* menjadi semakin relevan dalam menjadi jangkar stabilitas dan kemakmuran regional di Indo-Pasifik. Hal ini dilaksanakan dengan berperan sebagai fasilitator untuk menjadikan ASEAN relevan dan penting, tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan rakyat di luar ASEAN.

Selain itu, Indonesia juga membawa agenda untuk melanjutkan kembali negosiasi atas pembentukan kode tata perilaku (*Code of Conduct/CoC*) untuk pihak-pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Pembentukan CoC merupakan mandat dari deklarasi tata perilaku (*Declaration of Conduct/DoC*) yang telah disepakati oleh ASEAN dan Cina dalam KTT ASEAN di Phnom Penh tahun 2002.

***Bersambung ke halaman 3 >***



**(Sambungan dari halaman 2)**

Setelah beberapa tahun terjeda, inisiasi Indonesia untuk melakukan pembahasan dan negosiasi atas CoC pada periode keketuannya menjadi krusial mengingat ketegangan di Laut Cina Selatan kian meningkat sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Tak kalah penting adalah upaya Indonesia dalam mengatasi isu Myanmar yang berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan. Dalam keketuannya, Indonesia mendorong implementasi 5 poin kesepakatan para pemimpin ASEAN yang menjadi mekanisme utama ASEAN dalam mengatasi isu atau perkembangan di Myanmar.

Tentunya, keketuaan Indonesia diharapkan dapat memperkuat kesepakatan sehingga membuktikan efektivitas kelembagaan ASEAN dalam mengatasi isu internalnya sendiri. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan diri ASEAN dan membuktikan kredibilitas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan dunia.

Dengan agenda-agenda yang telah direncanakan, kita berharap negara-negara ASEAN di bawah keketuaan Indonesia mampu mengupayakan kestabilan, keamanan, dan perdamaian di kawasan sehingga dapat menciptakan pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, kawasan, dan dunia.

Tentunya kita berharap keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN 2023 dapat mendorong roda perekonomian nasional di berbagai kota yang menjadi tempat diselenggarakannya rangkaian side event KTT ASEAN 2023 sekaligus menjadi momentum untuk memperlihatkan kemajuan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh dan tangguh di tengah badai krisis sehingga Indonesia layak menjadi area bisnis yang dapat menarik investasi asing.

Dengan suksesnya rangkaian KTT ASEAN 2023 maka semakin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan yang secara konkret dapat memberikan manfaat kepada masyarakat regio-



gional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai *world's engine of sustainable growth*.

Untuk itu, mari kita dukung keketuaan Indonesia untuk ASEAN dengan turut menjunjung nilai solidaritas dengan semangat optimisme dan kerja sama, dengan membangun *collaborative governance multi stakeholder* untuk memastikan suksesnya KTT ASEAN 2023 dari sisi teknis dan substansi sehingga cita-cita untuk mewujudkan ASEAN yang tangguh terhadap berbagai gejolak krisis serta ASEAN yang mampu membawa kebermanfaatannya bagi masyarakat di Asia Tenggara dan dunia dapat diwujudkan.

**29 Agustus 2023**  
**Kunjungan kerja**  
**Diskominfotik &**  
**Bappeda Kota**  
**Semarang**

untuk berkoordinasi dengan  
Sekretariat Satu Data Indonesia  
Tingkat Pusat



## Peran Penting Kebijakan Satu Data dalam Penyusunan RPJMN 2025-2029

### (Sambungan dari halaman 1)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, penyusunan RPJPN 2025-2045 memiliki peran sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan yang telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu data menjadi salah satu aset paling berharga dalam upaya pembangunan suatu negara. Data yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif di berbagai bidang. Upaya untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan data telah diwujudkan melalui kebijakan Satu Data Indonesia.

Erwin Dimas, Plt Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menjelaskan bahwa SDI memiliki peran dalam penyediaan data terkait penyusunan RPJMN 2025-2029, diantaranya: (1) memfasilitasi penyediaan data 5 sasaran visi dan 45 indikator pembangunan pada RPJPN 2025-2045, serta (2) memfasilitasi penyediaan data indikator RPJMN 2025-2029 untuk penyusunan RKP dan pemantauan dan evaluasi pembangunan. “Selain itu satu sumber data yang terintegrasi akan membuat penyusunan RPJMN akan menjadi lebih terarah dan akurat.” tutur Erwin.



Mengacu pada tahapan pertama RPJPN, pada tahun 2025-2029 penguatan fondasi transformasi merupakan salah satu elemen krusial dalam RPJMN ini. Tahapan ini memainkan peran penting dalam memandu arah perubahan dan momentum untuk tahapan berikutnya mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, hingga landasan transformasi yang meliputi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas selaku ketua tim penyusunan RPJPN 2025-2045 mengatakan bahwa RPJPN merupakan *strategic direction* yang menjadi pedoman bagi semua *stakeholders* untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di dalam penyusunannya, RPJMN juga RPJPN bersifat lebih implementatif yaitu dengan memiliki 5 Sasaran Utama, 8 Agenda, 17 Arah Pembangunan, 45 Indikator dan Kerangka Kebijakan Transformatif termasuk 20 *Game Changers*.

Pada kesempatan yang sama, Alex Oxtavianus, Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menambahkan rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 harus memiliki nilai strategis dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Karena nilai strategis juga menjadi landasan dan instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan RPJMN, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa nilai-nilai strategis ini tercermin dalam setiap aspek kebijakan dan program yang diusulkan. “Sehingga, dukungan pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan aktivitas industri dan perdagangan serta skalabilitas yang optimal dapat menciptakan biaya logistik yang efisien dan mendorong terciptanya layanan yang lebih merata.” tutup Alex.

## Peran Penting Kebijakan Satu Data dalam Penyusunan RPJMN 2025-2029



**Erwin Dimas, Plt Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat** Menjelaskan Terkait Rancangan Teknokratik serta Dukungan Satu Data Indonesia pada Penyusunan RPJMN 2025-2029.

**Alex Oxtavianus, Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas** Menjelaskan Terkait Sosialisasi Kertas Kerja Penyusunan RPJMN 2025 -2029 berupa Penjabaran dan pentahapan 5 sasaran dan indikator visi Indonesia Emas, 17 arah pembangunan dan 45 indikator pembangunan serta 20 Upaya Transformatif Super Prioritas.



**Amalia Adininggar Widyasanti, Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas** selaku ketua tim penyusunan RPJPN 2025-2045 Menjelaskan Keterkaitan RPJPN dan Rancangan Teknokratik RPJMN, yaitu Kerangka Kebijakan Transformatif RPJMN Menuju Indonesia Emas 2045.

## Ekonomi Indonesia Triwulan II-2023 Tumbuh 5,17 Persen

Sumber: Badan Pusat Statistik



**(Sambungan dari halaman 1)**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi nasional melanjutkan tren di atas 5% selama tujuh triwulan berturut-turut, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Pencapaian nasional ini juga lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 4,1%; 0,6%; 2,6%; dan 0,9% (yoy) pada periode yang sama.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh peningkatan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,23% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, terkendalinya inflasi, dan dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara.

Jika melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2023 dan triwulan II-2022 mengalami kenaikan sebesar 5,17 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen.

Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

Meskipun demikian, pemerintah tetap akan terus memantau dan mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dunia saat ini yang dampaknya terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. Tidak hanya itu pemerintah optimis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 5,1%.

## Waspada Kualitas Udara Buruk Ibu Kota Jakarta!



Kualitas udara yang buruk telah menjadi masalah serius di banyak kota besar di seluruh dunia, termasuk di ibu kota Indonesia, Jakarta.

Pada bulan Agustus 2023, Jakarta mengalami tingkat polusi udara yang mengkhawatirkan dan memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sejumlah wilayah terlacak menjadi langganan zona merah polusi, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan.

Untuk mengetahui indeks standar udara yang berkualitas harus berdasarkan dari parameter Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran kualitas dari udara yang ada di wilayah Indonesia, pemerintah menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

### Faktor dan Penyebab Udara Buruk di Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan banyak faktor penyebab polusi udara di Jakarta saat ini. Ada beberapa faktor antara lain kemarau panjang, kemudian konsentrasi polutan, lalu ada emisi dari transportasi termasuk dari manufaktur industri.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan, sumber pencemaran polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu berasal dari kendaraan dengan kontribusi sebesar 44%, lalu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki peran sebesar 34%, dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga hingga pembakaran.

### Dampak Udara Buruk bagi Kesehatan

Kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya terbilang memprihatinkan. Indikator memperlihatkan bahwa udara di Jakarta tergolong tidak sehat. Berdasarkan data yang disampaikan iQAIR, indeks kualitas udara tercatat di angka 150 hingga 175.

Kemudian, konsentrasi polutan udara DKI Jakarta tercatat di angka PM 2.5, dengan nilai konsentrasi 79 mikrogram per meter kubik. Hal ini masih jauh dari standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, bahkan 15,8 kali di atas standar.

Udara buruk memiliki dampak serius pada kesehatan, terutama terkait dengan pernafasan hingga penyakit kardiovaskular dan pengurangan kualitas hidup.

***Bersambung ke halaman 8 >***

## Waspada Kualitas Udara Buruk Ibu Kota Jakarta!

(Sambungan dari halaman 7)

### Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kualitas Udara di Ibu Kota

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa polusi udara berkontribusi besar terhadap enam besar penyakit gangguan pernapasan di Indonesia, yaitu pneumonia (infeksi paru), infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, tuberkulosis, kanker paru, dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK).

Hal tersebut disampaikan Menkes usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai peningkatan kualitas udara di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/08/2023).

Kementerian Kesehatan mendorong penggunaan masker sebagai upaya preventif atau pencegahan jika polusi udara terpantau tinggi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.

Menkes menyampaikan, untuk menurunkan risiko dan dampak kesehatan dari polusi udara, pihaknya akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya polusi udara bagi kesehatan.

Kemudian, Kemenkes juga akan melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jabodetabek terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernapasan.

**Bersambung ke halaman 9 >**

# Dampak Polusi Udara

Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta



### Akut

- ISPA
- Asma akut
- Pneumonia
- Jerawat, alergi, masalah kulit lainnya
- Bronkitis akut

### Kronis

- Kelahiran prematur dan pertumbuhan janin terhambat
- Penyakit vaskular (stroke, jantung, hipertensi)
- Kemandulan/infertilitas
- Gangguan saraf

## Cara menjaga kesehatan selama kualitas udara buruk



**Pakai masker medis/N95/N99**



**Menjaga pola hidup sehat**



**Hindari keluar ruangan, terutama bagi kelompok rentan**



**Suplemen vitamin C, D3 pengganti sinar matahari pagi, asam lemak omega**

## Waspada Kualitas Udara Buruk Ibu Kota Jakarta!

**(Sambungan dari halaman 9)**

Harapannya, apabila masyarakat harus dirawat karena penyakit dari dampak udara buruk Jakarta, masyarakat bisa mendapatkan penanganan dan diagnosis yang sama.

Tidak hanya itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggunakan Teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan dengan mengandalkan pertumbuhan awan dan arah angin. Operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara telah dimulai sejak 24 Agustus yang lalu. Meskipun hujan buatan di Jakarta berhasil terjadi di beberapa kesempatan dengan intensitas lebat, seperti pada 27 Agustus 2023 malam.

Keberhasilan teknologi modifikasi cuaca di Indonesia seperti hujan buatan di Jakarta ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan awan dan arah angin. Ahli berpendapat bahwa kurangnya daerah kontrol dalam operasi teknologi modifikasi cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari hujan buatan.

Selain itu, jenis awan tropis yang sulit dimodifikasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan hujan buatan di wilayah Jakarta. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan hujan buatan di Jakarta harus dilakukan dengan desain statistik yang akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang kompleks.

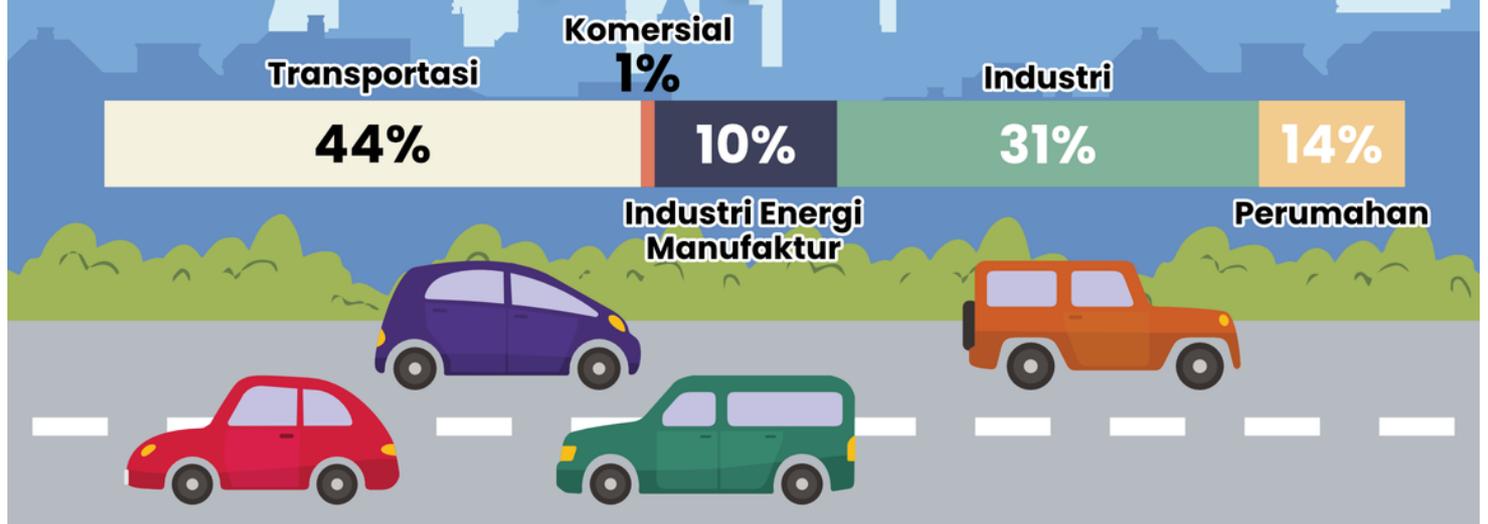
Kualitas udara buruk di Ibu Kota Jakarta pada Agustus 2023 menjadi tantangan serius yang memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengatasi faktor-faktor penyebab utama dan mengimplementasikan langkah-langkah penanggulangan yang efektif, diharapkan kualitas udara di Jakarta dapat ditingkatkan, memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

## Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Memburuk

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro mengungkapkan sejumlah penyebab buruknya kualitas udara Jakarta yang belakangan menjadi sorotan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi polusi udara Jakarta kian memburuk.

### Sektor Penyumbang Polusi di DKI Jakarta



## Target Penanganan Stunting Dapat Tercapai di Tahun 2024



**Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D**

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia pada periode 2019-2022, tren angka stunting di Indonesia mengalami penurunan.

Pada tahun 2022, angka stunting turun menjadi 21,6 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,4 persen. Angka ini mengalami penyusutan cukup jauh dari kondisi tahun 2019 yaitu sebesar 27,7 persen. Bila di rata-rata pada kurun 2019-2022, angka stunting di Indonesia menurun 2,03 persen per tahun. Pencapaian itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebanyak 514 Kabupaten/Kota sudah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan upaya percepatan penanganan stunting di daerahnya.

Wujud dari komitmen itu salah satunya adalah menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah untuk setiap intervensi yang dibutuhkan dalam upaya penurunan stunting. Termasuk mengoptimalkan anggaran untuk program-program yang sesuai kebijakan dan sasaran strategi nasional guna percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa dukungan berbagai pihak tidak hanya pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan stunting secara optimal.

**“Sisi pembiayaan ya kita padukan pembiayaan antara pemerintah kemudian ada pembiayaan daerah dan kita harapkan ada partisipasi masyarakat. Dengan kombinasi tiga inilah kita berharap ada percepatan penurunan stunting. Karena stunting itu sangat besar biayanya, jadi tidak bisa hanya anggaran pemerintah tapi dukungan anggaran Pemda dan anggaran masyarakat. Ini sama-sama nanti akan menurunkan stunting di Indonesia.”**

Penurunan angka stunting di Indonesia dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 adalah prestasi yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya serius dalam hal gizi anak-anak, akses terhadap pelayanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan pemberantasan infeksi dapat memberikan dampak yang signifikan.

Namun, perlu diingat bahwa pekerjaan ini belum selesai. Upaya terus-menerus diperlukan untuk menjaga dan bahkan meningkatkan penurunan angka stunting guna memastikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia.

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka stunting, masih banyak tantangan yang masih perlu diatasi pada tahun 2023. Upaya yang lebih besar untuk mengatasi kesenjangan regional, meningkatkan akses terhadap gizi yang baik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik gizi yang benar, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan sangat penting. Selain itu, perhatian terus-menerus terhadap faktor-faktor sosial-ekonomi, perubahan iklim, dan keterlibatan komunitas akan membantu mencapai target penurunan stunting yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, berbagai upaya dalam penurunan stunting salah satunya dilakukan melalui dua intervensi gizi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

***Bersambung ke halaman 11 >***

## Target Penanganan Stunting Dapat Tercapai di Tahun 2024

**(Sambungan dari halaman 10)**

Sementara itu, intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar kewenangan Kementerian Kesehatan.

Dalam penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70 persen sementara intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya. Selain dua hal tersebut, Pungkas menambahkan bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor juga memegang peranan kunci untuk mencapai target pengurangan stunting pada tahun 2023 bahkan tahun 2024 mendatang.

Tidak hanya itu, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-

pemerintah juga faktor pendukung yang memungkinkan terjadinya penurunan stunting seperti komitmen politik dan kebijakan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor serta kapasitas untuk melaksanakan intervensi yang ada.

Hal ini bertujuan agar memastikan pertumbuhan anak-anak yang sehat serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

### Peran Satu Data dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Indonesia

Data memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia, seperti juga dalam upaya penurunan stunting di negara-negara lain. Karena data merupakan dasar yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengukur keberhasilan program-program penurunan stunting di Indonesia.

Menurut Pungkas, penyediaan data prevalensi stunting melalui sistem pendataan yang akurat merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, kabupaten hingga kota. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting.

Percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* pada 2030 mendatang. Selain itu, terdapat target penurunan angka stunting hingga menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dalam menuju Indonesia Emas 2045.





### **Tim Penyusun**

1. Tridias Soja Anggraini
2. Prita Ramadiani
3. Galih Yudhasena Trenggala
4. Finda Fadilla
5. Rynaldi Tallamma

### **Kontributor**

Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D

### **Sekretariat Satu Data Indonesia**

Jl. Karawang No.4, RW.4, Menteng, Kec. Menteng,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310  
+62 822-6000-7040



[data.go.id](https://data.go.id)



[data.go.id](https://www.instagram.com/data.go.id)



[datagoid](https://twitter.com/datagoid)